

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2019 merupakan Tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dan pelaksanaan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melaksanakan Misi dari Visi Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yaitu : Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”

Pelaksanaan Penyusunan LkjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 merupakan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang memanfaatkan segala sumber daya dan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja, keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Perm

enan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran yaitu Tahun 2018 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LkjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur dan juga kepada

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

masyarakat atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas Dinas Kelautan Dan Perikanan, adalah :

“membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi

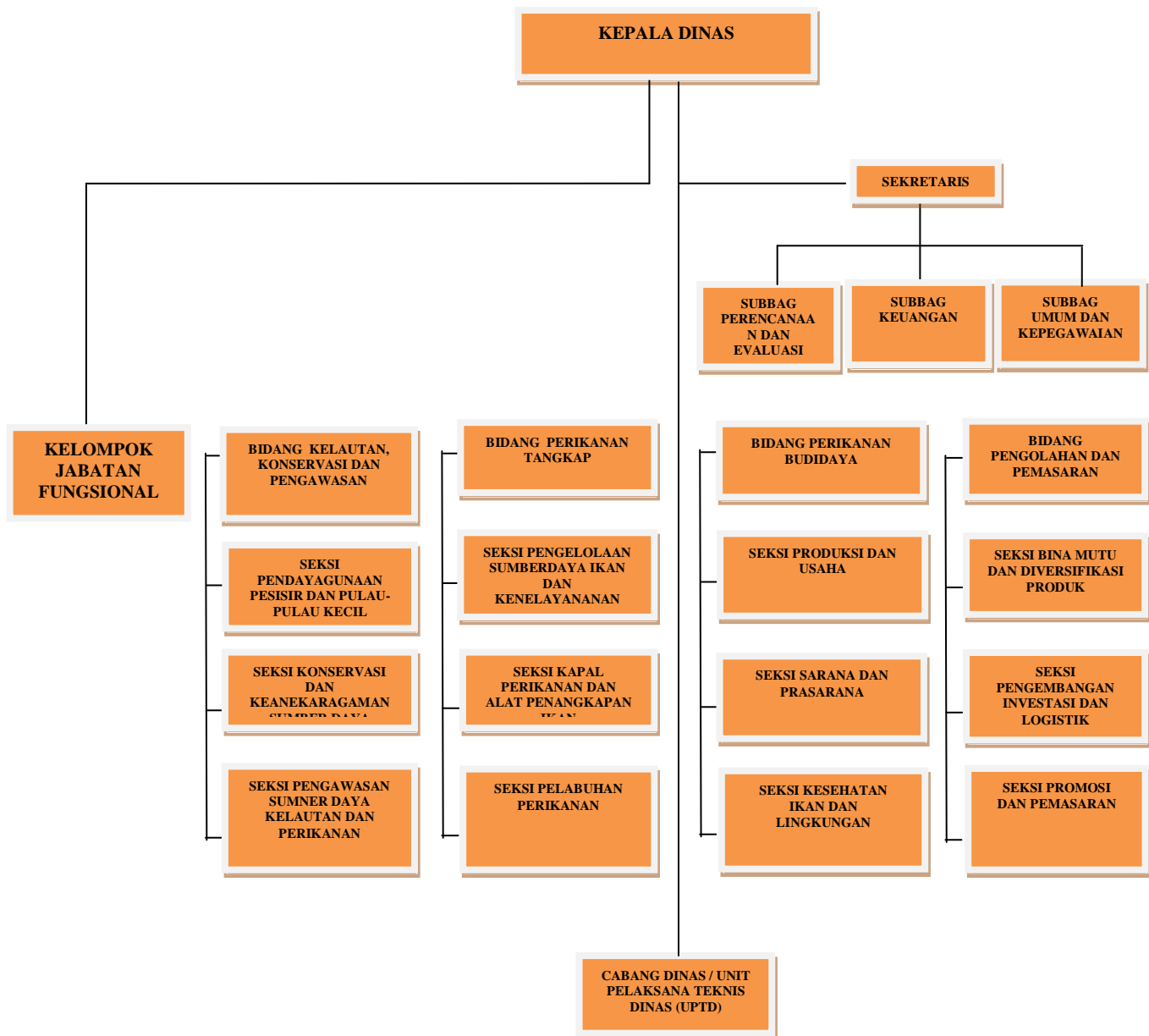
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- d. penyelenggaraan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh gubernur.

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan;
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

1.3.2. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPRI

Pada tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah pegawai sebanyak 218 orang terdiri dari 90 orang PNS, 15 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 113 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.a, dapat diketahui bahwa berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 0 orang, Golongan II 12 orang, Golongan III 62 orang dan Golongan IV 6 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang lulusan SD adalah 1 orang, SMP 0 orang, SMA 14 orang, D3 7 orang, D4 8 orang, S1 56 orang :

UNIT ORGANISASI	JUMLAH	P E G A W A I																				
		THL	PTT	Jumlah Gol. II	II				Jumlah Gol. III	III				Jumlah Gol. IV	IV							
					a	B	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e			
1	Dinas Induk																					
	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi	8	6	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Bag Keuangan	6	1	2	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Bag Umum Kepegawaian	15	11	1	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bid Kelautan, Konservasi dan Pengawasan	25	11	1	4	1	2	-	1	9	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bid Perikanan Tangkap	21	3	4	1	-	-	-	1	11	-	5	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-
	Bid Perikanan Budidaya	18	5	3	-	-	-	-	-	8	-	4	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	Bid Pengolahan dan Pemasaran	14	5	1	-	-	-	-	-	7	2	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-
2	UPTD BPMPPKP	18	12	1	1	-	-	-	1	3	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-
3	UPTD PPP Antang	15	10	-	1	-	-	-	1	3	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4	UPTD BBI	29	24	-	1	-	-	-	1	3	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
5	Cabdis Batam	16	8	1	-	-	-	-	-	6	1	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
6	Cabdis Karimun	10	5	-	-	-	-	-	-	5	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Cabdis Natuna	6	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
8	Cabdis Anambas	5	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
9	Cabdis Lingga	10	6	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H	218	112	14	10					68					14							

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

1.4. POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.4.1. PERIKANAN TANGKAP

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar berada di wilayah pengelolaan perikanan Laut Cina Selatan dan Natuna dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sampai garis yang menghubungkan 04° LS # 106° BT dengan 03° LS # 111° BT. dengan potensi sebagaimana terlihat pada table berikut :

Tabel 1. Potensi Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau

<i>Jenis Sumber Daya Ikan (SDI)</i>	<i>Estimasi Potensi SDI</i>	<i>Estimasi Tingkat Pemanfaatan</i>	<i>Peluang Pengembangan Produksi</i>
	<i>(ton/tahun)</i>	<i>(ton)</i>	<i>(ton)</i>
Ikan Pelagis	559,828	84,060	475,768
Ikan Demersal	272,594	75,435	197,159
Ikan Karang	17,562	13,568	3,994
Total	849,984	173,063	676,921

Sumber : Hasil Kajian Identifikasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri (DKP Kepri, 2011).

1.4.2. PERIKANAN BUDIDAYA

Provinsi Kepri yang memiliki laut seluas 24.121.530,0 ha (95,79%) dan daratan seluas 1.059.511,0 ha (4,21%) menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya (akuakultur) yang sangat besar, terutama budidaya laut (marikultur). Di Provinsi ini diperkirakan terdapat sekitar 455.779,9 ha areal laut yang berpotensi untuk pengembangan marikultur, yang terdiri dari 54.672,1 ha untuk marikultur pesisir (*coastal marine culture*) dan 401.107,9 ha untuk marikultur lepas pantai (*offshore marine culture*) yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota, Daerah tingkat II yang memiliki potensi pengembangan marikultur yang tinggi adalah Kabupaten Lingga, yakni mencapai 19.054 ha untuk *coastal marine culture* dan sekitar 226.538 ha untuk *offshore marine culture*.

Tabel 2. Potensi Perikanan Budidaya di Provinsi Kepulauan Riau

<i>Kabupaten/ Kota</i>	<i>Luas Daratan (ha)</i>	<i>Panjang Garis Pantai (km)</i>	<i>Budidaya di Laut (ha)</i>		<i>Budidaya di darat (ha)</i>	
			<i>Pesisir</i>	<i>Laut Lepas</i>	<i>Air Payau</i>	<i>Air Tawar</i>
Batam	211.772	172	10.710	50.422	288	150
Bintan	194.613	435	6.684	37.517	250	389
Karimun	287.320	642	10.211	47.232	190	65
Natuna	205.845	460	6.021	20.393	507	22
Anambas	59.014	132	1.993	19.005	0	50
Lingga	23.920	473	19.054	226.538	828	83
Tanjungpinang	77.027	53	0	0	0	60
Jumlah	1.059.511	2.368	54.672	401.108	2.063	819
Luas Laut	24.121.530			455.780		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Komoditas yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Kepri mencakup ikan air laut, rumput laut, ikan dan udang air payau, dan ikan air tawar.

1.4.3. PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pesisir dan Pulau-pulau kecil merupakan sumberdaya kelautan yang memiliki potensi sumberdaya yang besar untuk dimanfaatkan. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif misalnya ekosistem mangrove, terumbu karang dan ekosistem lamun beserta biota yang hidup didalamnya yang dapat menjadi sumber bahan makanan, pariwisata, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya. Dengan demikian kawasan pulau-pulau kecil mengandung potensi pengembangan yang prospektif yang dapat menyumbangkan pendapatan bagi daerah dan membantu didalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data terakhir terdapat \pm 2.408 pulau-pulau besar dan kecil di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang tervalidasi sebanyak 1.890 Pulau (BIG, 2017; Gazetter, 2012). Jumlah pulau tersebut hampir 14 % dari seluruh jumlah pulau di Indonesia. Sampai saat ini \pm 950 pulau masih berupa pulau-pulau kosong. Berdasarkan inventarisasi yang sudah dilakukan, sebanyak 1.350 pulau sudah memiliki nama dan sisanya sampai saat ini merupakan pulau yang belum bernama.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, dari ribuan pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdapat 22 pulau yang memiliki titik dasar (TD/*Basepoint*) yang menjadi titik pangkal dalam menentukan batas maritim dengan negara lain. Pulau-pulau perbatasan ini sekaligus juga menyimpan potensi konstelasi perbatasan dengan negara tetangga. Pulau-pulau tersebut tersebar di 5 (empat) wilayah administrasi Kabupaten/Kota dengan konsentrasi terbesar terdapat di Kabupaten Natuna sebanyak 7 pulau, Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 4 Pulau, Kota Batam 4 Pulau, Kabupaten Karimun 2 pulau dan Kabupaten Bintan 5 pulau. Kondisi pulau pada umumnya masih alami berupa pulau batu dan karang dengan luas rata-rata dibawah 0.5 Km².

Tabel 3. Nama Pulau-pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Pulau	Koordinat	Penduduk(KK)	Lokasi
1.	Damar	02 ⁰ 44'29" U, 105 ⁰ 22'46" T	Tdk Berpenghuni	Anambas
2.	Kepala	02 ⁰ 38'43" U, 109 ⁰ 10'04" T	Berpenghuni	Natuna
3.	Mangkai	03 ⁰ 05'32" U, 105 ⁰ 35'00" T	Berpenghuni	Anambas
4.	Sebetul	04 ⁰ 42'25" U, 107 ⁰ 54'20" T	Tdk Berpenghuni	Natuna

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

5.	Sekatung	04 ⁰ 47'38" U, 108 ⁰ 00'39" T	Berpenghuni (5)	Natuna
6.	Semiun	04 ⁰ 31'09" U, 107 ⁰ 43'17" T	Berpenghuni	Natuna
7.	Senua	04 ⁰ 00'48" U, 108 ⁰ 25'04" T	Berpenghuni (1)	Natuna
8.	Subi Kecil	04 ⁰ 01'51" U, 108 ⁰ 54'52" T	Berpenghuni	Natuna
9.	Tokong Belayar	03 ⁰ 27'04" U, 106 ⁰ 16'08" T	Tdk Berpenghuni	Anambas
10.	Tokong Boro	04 ⁰ 04'01" U, 107 ⁰ 26'29" T	Tdk Berpenghuni	Natuna
11.	Tokong Malang Biru	02 ⁰ 18'00" U, 105 ⁰ 35'47" T	Tdk Berpenghuni	Natuna
12.	Tokong Nanas	03 ⁰ 19'52" U, 105 ⁰ 57'04" T	Tdk Berpenghuni	Anambas
13.	Pulau Sentut	01 ⁰ 02'52" U, 104 ⁰ 49'50" T	Tdk Berpenghuni	Bintan
14.	Tokong Iyu Kecil	01011'30" U, 103 ⁰ 21'08" T	Tdk Berpenghuni	Karimun
15.	Karimun Kecil	01 ⁰ 09'59" U, 103 ⁰ 23'20" T	Berpenghuni	Karimun
16.	Nipa	01 ⁰ 09'13" U, 103 ⁰ 39'21" T	Tdk Berpenghuni	Batam
17.	Nongsa	01 ⁰ 12'29" LU, 104 ⁰ 04'47" BT	Tdk Berpenghuni	Batam
18.	Pelampong	01 ⁰ 07'44" U, 103 ⁰ 41'58" T	Berpenghuni (3)	Batam
19.	Batu Berhanti	01 ⁰ 11'06" U, 103 ⁰ 52'57" T	Berpenghuni (5)	Batam
20.	Berakit	01 ⁰ 14'10" U, 104 ⁰ 34'18" T	Berpenghuni	Bintan
21.	Malang Berdaun	01 ⁰ 14'18" U, 104 ⁰ 33'57" T	Berpenghuni	Bintan
22.	Bintan	01 ⁰ 12'18" U, 104 ⁰ 23'37" T	Berpenghuni	Bintan

(Sumber : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar)

1.5. PERENCANAAN STRATEGIS

1.5.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala Provinsi Kepulauan Riau terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: *"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"* .

dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan Misi Gubernur Kepulauan Riau yaitu pada misi ke-5 :

Menjabarkan misi ke-5 Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yang berkaitan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, yakni Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomidan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan" maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan produksi perikanan, budidaya, perikanan tangkap, dan hasil olahan perikanan (*productivity*);
2. Mengembangkan diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan; (*competitiveness*);
3. Menjaga Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (*sustainability*).

1.5.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, maka diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang tepat. Berikut ini adalah beberapa strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mewujudkan tujuan, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, melalui Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap untuk nelayan skala kecil;
2. Percepatan pengembangan perikanan budidaya, melalui peningkatan sarana prasarana budidaya laut, air payau, air tawar serta pembenihan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

3. Percepatan pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap, melalui pengembangan sarana armada dan alat tangkap perikanan serta pelabuhan perikanan;
4. Percepatan pengembangan pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengembangan sarana prasarana pengolahan, pemasaran, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan, pengendalian, pengujian serta penjaminan mutu hasil-hasil perikanan;
5. Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui konservasi, program coremap, pengawasan dan penataan pemanfaatan potensi.

Dalam mewujudkan strategi tersebut diatas, arah kebijakan yang harus ditempuh adalah:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan fokus pada :
 - a. Penataan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - b. Pengembangan Usaha PerikananTangkap;
 - c. Pengendalian Perikanan Tangkap.
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan focus pada:
 - a. Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan
 - b. Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
 - c. Pengendalian dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya
3. Meningkatkan sarana prasarana kelautan dan perikanan, melalui Pengembangan Usaha PerikananTangkap (Pengembangan kapal perikanan dan Pengembangan sarpras pelabuhan perikanan);
4. Mengembangkan dan memperkuat industri, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta peningkatan mutu hasil perikanan, dengan fokus pada:
 - a. Bina Mutu, Pemasaran dan Promosi Kelautan dan Perikanan;
 - b. Penyuluhan dan Penguatan Usaha Kelautan dan Perikanan;
 - c. diversifikasi produk olahan hasil kelautan dan perikanan
5. Meningkatkan kawasan konservasi mandiri, dengan fokus pada:
 - a. Identifikasi dan penataan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
 - b. Pengelolaan, Rehabilitasi dan perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan fokus pada:
 - a. Pengawasan dan penertiban kelautan dan perikanan;

- b. Pengendalian perizinan usaha perikanan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 maka dapat dilihat sasaran dan target pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	305,239.05
		- Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	33,784.95
		- Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	110.08
		- Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%)	107.99
2.	Meningkatnya Produksi olahan hasil perikanan	- Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	1,326.23
3.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan	- Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III (kawasan)	4
		- Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (Dokumen)	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 7.529.240.000,-	APBD-P
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 1.574.329.000,-	APBD-P
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp. 5.350.000.000,-	APBD-P
4. Program Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan	Rp. 500.000.000,-	APBD-P
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.584.000.000,-	APBD-P
6. Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 729.360.000,-	APBD-P
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 12.376.400.000,-	APBD-P

2.2. LATAR BELAKANG INDIKATOR KINERJA

Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km².

Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau, Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

NO	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km²)
1.	Kabupaten Bintan	1.318,21
2.	Kabupaten Karimun	912,75
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
	Total	8.201,72

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Dengan panjang garis pantai 8.561,33 Km, dengan Kondisi demikian, tentunya Provinsi Kepulauan Riau menyimpan Potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, yang terdiri dari berbagai hasil perikanan laut (perikanan tangkap dan budidaya), wisata bahari dan pantai, ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut serta beragam jenis biota laut lainnya.

Untuk mengelola potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan posisi yang cukup kuat dalam membangkitkan kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan untuk kemajuan masyarakat Kepulauan Riau. Kuatnya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibuktikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 dengan Visi adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”. yang diwujudkan kedalam 9 misi utama pembangunan daerah.

9 (Sembilan) misi pembangunan Kepulauan Riau terdapat pada misi ke-5: “Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan”.

Indikator kinerja merupakan suatu acuan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Indikator kinerja haruslah terukur sehingga dapat dilakukan evaluasi secara kuantitatif dan dapat digunakan sebagai pengukur keberhasilan suatu rencana program. Berdasarkan pada tujuan dan sasaran renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menurut rencana program :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, indikator kinerjanya adalah :
 - a) Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap (satun : Ton)
 - b) Nilai Tukar Nelayan (NTN), (satuan : Angka indeks)

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya. indikator kinerjanya adalah :
 - a) Jumlah produksi perikanan budidaya (satuan : ton/tahun) ;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

- b) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (satuan : Angka indeks);
3. Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan, indikator kinerjanya adalah :
- a) Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)
 - b) Angka Konsumsi ikan per kapita (kg/tahun) (Kg/Kapita/ Tahun)
4. Program Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, indikator kinerjanya adalah :
- a) Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III (level)
 - b) Peyediaan dokumen perencanaan pengelolaan Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (dokumen)

2.2.1. PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI KEPRI

Dalam melaksanakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan ada beberapa isu strategis / permasalahan yang akan diselesaikan, antara lain :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap.
- b. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan terbatasnya sarana budidaya perikanan.
- c. Industri hilir perikanan (pengolahan ikan) masih minim dan jumlah produk olahan hasil perikanan yang masih terbatas.
- d. Belum adanya zonasi/tata ruang wilayah pesisir dan laut yang menjamin kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
- e. Masih adanya *IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)* berupa transaksi ikan di tengah laut.

dari rumusan permasalahan dibidang kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau dapat diuraikan permasalahan krusial yang harus mendapatkan penyelesaian melalui pembangunan di sektor kelautan dan perikanan atau menjadi isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri, adalah sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya pemanfaatan perikanan : tangkap rendahnya produksi perikanan tangkap berbanding potensi yang ada (Estimasi Potensi SDI dengan Pendekatan Kajian Komnasjiskan, (Kepmen N0.45/MEN/2011) WPP 711

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

sejumlah 1.057.050 ton / tahun berbanding tingkat pemanfaatan nelayan kepri yang hanya 407.235,91 atau 38,5% di tahun 2015);

2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya : rendahnya produksi perikanan budidaya berbanding potensi yang ada (potensi budidaya laut 455.780 Ha pemanfaatan : 2.218 Ha (0,5%)); (Potensi lahan budidaya air payau 2.063 Ha, pemanfaatan : 69,1 Ha (3,34%)); (Potensi Lahan budidaya air tawar (8.111,21 Ha) : pemanfaatan hanya 4.427,65 Ha (54,59%)) dan terbatasnya sarana budidaya perikanan, seperti: benih ikan dan pakan ikan;
3. Struktur armada kapal perikanan masih didominasi armada dan alat tangkap tradisional dan terbatasnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan lainnya, seperti: Pelabuhan Perikanan, cold storage dan pabrik es serta masih terbatasnya BBM subsidi khusus untuk operasional nelayan;
4. Menurunnya daya dukung ekosistem perairan, daya dukung ekosistem perairan yang berimbas pada penurunan produksi perikanan;
5. IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) masih terjadi;

2.2.2. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai Penjabaran Misi Kepala Daerah Provinsi Kepri

Misi Gubernur Kepulauan Riau yang di emban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah misi ke-5 : "**Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan**".

menjawab isu strategis di bidang kelautan dan perikanan maka disusunlah Tujuan, Sararan dan strategi pada RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Tujuan, sasaran dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.	Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman	Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan	Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan, dan mengembangkan sarana prasarana pengolahan.

dalam rangka mencapai tujuan : "meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman" maka ditetapkan sasaran yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu : "Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan" dengan strategi :

"Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan, dan mengembangkan sarana prasarana pengolahan".

2.2.3. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 untuk mencapai Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton);

Pengembangan perikanan tangkap yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri dilaksanakan dalam program/kegiatan pengembangan perikanan tangkap diukur dalam indikator pencapaian produksi perikanan tangkap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton);

Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dalam rangka pemanfaatan potensi perikanan budidaya Provinsi Kepri dan dilaksanakan dengan program/kegiatan pengembangan perikanan budidaya yang kemudian diukur dalam indikator pencapaian produksi perikanan budidaya.

3. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)

Pengembangan produk olahan hasil perikanan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap produk hasil perikanan dan dapat diterima pasar dalam maupun luar negeri, Indikator pencapaian kinerja ini adalah jumlah produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan setiap tahunnya.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Untuk memudahkan mendapatkan gambaran umum capaian kinerja sasaran secara keseluruhan dilakukan kategori capaian kinerja berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja yaitu sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Utama

NO	RENTANG CAPAIAN	KETERANGAN
1	Capaian \geq 91%	Sangat Tinggi (ST)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

2	76% ≥ capaian < 90%	Tinggi (T)
3	66% ≥ capaian < 75%	Sedang (S)
4	51% ≥ capaian < 65%	Rendah (R)
5	Capaian < 50%	Sangat Rendah (SR)

Untuk menyimpulkan keberhasilan kinerja Sasaran dilakukan dengan merata-rata setiap capaian indikator kinerja masing-masing.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2019 yang dituangkan didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Evaluasi Capaian Sasaran Tahun 2019 berdasarkan Target pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.239,05	309.287,15	101,33
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	110,08	117,42	106,66
	Jumlah produksi perikanan Budidaya	Ton	33.784,95	33.003,11	97,69
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	107,99	126,77	117,39
Meningkatnya Produksi olahan hasil perikanan	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.326,23	1.803,55	135,99
Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan	Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III	Kawasan	4	1	25,00
	Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	-	0

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah dicapai pada pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 dapat dilihat dari perkembangan indikator pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari tabel-tabel di bawah ini :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan

A. JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah Jumlah hasil tangkapan ikan di perairan Kepulauan Riau oleh perusahaan perikanan maupun kelompok nelayan pesisir dan didaratkan di pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan yang ada di Provinsi Kepri.

Evaluasi terhadap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah Jumlah hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan dan sentra produksi baik perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum dan hasil estimasi di desa sampel oleh petugas statistik bidang perikanan tangkap di Kab/Kota Data di atas dikompilasi dan divalidasi oleh petugas.

Hasil evaluasi terhadap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan target sebesar **305.239,05** Ton di tahun 2019 terealisasi sebesar **309.287,15** atau 101,33% atau dalam **kategori kinerja sangat tinggi**.

Berikut tabel perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2019 :

Tabel.3.3 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2018	2019
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	304.975,02	309.287,15

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dari Tahun 2018 ke tahun 2019 walaupun tidak signifikan. Pada Tahun 2018 produksi perikanan tangkap sebesar 304.975,02 Ton dan di tahun 2019 produksi meningkat menjadi **309.287,15** Ton atau meningkat sebesar 1,3%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Berdasarkan pengamatan dan beberapa sumber informasi dilapangan, peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Tahun 2019 disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- a. Telah berkurangnya praktik illegal fishing oleh kapal asing, sehingga stock ikan yang tersedia terjaga;
- b. Moratorium izin kapal eks asing;
- c. Serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;

Selain faktor kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam upaya meningkatkan produksi perikanan. Beberapa kebijakan juga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- i. Untuk menekan biaya produksi di bidang perikanan tangkap : jauhnya jarak antara pangkalan armada perikanan tempat labuh kapal ikan dengan lokasi sentra penangkapan ikan yang rata-rata melakukan operasional di Laut China Selatan dan Perairan Anambas, untuk hal ini pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya dengan membangun Pelabuhan Perikanan di Natuna dan mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Tipe Pelabuhan Perikanan Pantai di Antang Tarempa Kab. Kepulauan Anambas guna memperpendek jarak antara lokasi penangkapan dan tempat pendaratan ikan;
- ii. Masih banyaknya nelayan di Provinsi Kepri yang melakukan pekerjaan secara individu, program pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan badan usaha seperti Koperasi nelayan terus digalakkan oleh pemerintah karena dapat menekan biaya produksi dengan mendapatkan BBM subsidi;
- iii. Pelarangan pemakaian beberapa jenis alat tangkap pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015 tentang penggunaan pelarangan jaring pukat atau trawl yang berlaku sejak 9 Januari 2015 pemerintah Provinsi Kepri melalui DKP Provinsi Kepri

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

melakukan pembinaan-pembinaan dalam rangka mengganti/revitalisasi alat tangkap yang dipakai nelayan.

Tabel 3.4
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019

No.	Kabupaten / Kota	2018	2019
1	Karimun	73,619.29	61,174.94
2	Bintan	52,025.71	56,315.00
3	Natuna	82,123.17	47,579.32
4	Lingga	33,650.37	44,137.53
6	Kep Anambas	28,790.99	28,776.88
7	Batam	32,866.81	60,663.47
8	Tanjungpinang	1,898.69	10,640.00
	JUMLAH	304,975.02	309,287.14

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Produksi Perikanan Tangkap mengalami peningkatan di setiap Kabupaten/Kota walaupun tidak signifikan.

B. NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu proxy indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan nelayan di suatu daerah pada tahun dan bulan tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya. NTN dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan nelayan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi. NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB), yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100 artinya nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. NTN kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTN sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

Evaluasi terhadap indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dilakukan pencacahan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menghitung angka kesejahteraan nelayan. Hasil evaluasi terhadap Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan target sebesar **109.84** di

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

tahun 2018 terealisasi sebesar **115.26** atau **104.93%** atau dalam kategori kinerja **Sangat Tinggi**.

Berikut tabel perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Tukar Nelayan Tahun 2016-2017 :

Tabel.3.5 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018 - 2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2018	2019
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	115.26	117.42

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari Tahun 2018 ke tahun 2019. Pada Tahun 2018 NTN sebesar 115,26 dan di tahun 2019 meningkat menjadi 117,42 Hal ini berarti bahwa pada tahun 2018 secara rata-rata nelayan mengalami surplus dari hasil usahanya dibandingkan dengan pengeluarannya akibat dari kenaikan harga produksi lebih besar akibat dari peningkatan produksi perikanan tangkap berbanding kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksinya di Tahun 2019.

Tahun 2019 NTN Provinsi Kepri bergerak fluktuatif dengan mengikuti pergerakan harga kelompok komoditas barang/jasa pada kenaikan harga produksi dan kenaikan barang konsumsi dan biaya produksi. Pertumbuhan NTN tersebut akibat dari kenaikan rata-rata pendapatan nelayan yang sedikit lebih tinggi dari kenaikan rata-rata pengeluaran konsumsi dan biaya produksi nelayan. Artinya meskipun harga komoditas yang dibelanjakan nelayan rata-rata mengalami kenaikan dalam satu tahun namun tidak lebih besar dari kenaikan harga ikan hasil tangkapannya.

C. JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah Jumlah hasil budidaya ikan terdiri dari budidaya ikan laut termasuk budidaya rumput laut, ikan air tawar dan ikan budidaya di air payau baik yang dilakukan perorangan maupun Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di Provinsi Kepri.

Pencacahan produksi perikanan budidaya dilakukan oleh petugas statistik Kabupaten/Kota dengan metode pengumpulan data statistik perikanan budidaya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Evaluasi terhadap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah Jumlah hasil ikan budidaya yang di panen dicatat/ di cacah oleh petugas statistik perikanan budidaya/ *eunerator* maupun perhitungan secara estimasi di desa sampel di Kab/Kota Data di atas dikompilasi dan divalidasi oleh petugas.

Hasil evaluasi terhadap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dengan target sebesar **33.784,95** Ton di tahun 2019 terealisasi sebesar **33.003,11** Ton atau 97,69% atau dalam **kategori kinerja Sangat Tinggi** namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut tabel perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2019 :

Tabel.3.6 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2018	2019
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	34,399.86	33,003.11

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari Tahun 2018 ke tahun 2019. Pada Tahun 2018 produksi perikanan budidaya sebesar 34.399.86 Ton dan di tahun 2019 produksi mengalami penurunan menjadi 33,003.11 Ton atau menurun sebesar 4.06%. Penurunan produksi perikanan budidaya ini disebabkan terjadinya penurunan produksi rumput laut di Kabupaten Natuna dikarenakan pembudidaya tidak melakukan aktifitasnya lagi. Penyebabnya harga rumput laut yang turun dan pasar yang tidak lagi tersedia.

Solusi dan kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya adalah :

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kerjasama dengan pihak swasta agar Keramba Jaring Apung (KJA) yang telah diberikannya kepada pembudidaya ikan laut milik masyarakat di Batam, Bintan dan Karimun aktif kembali dengan memfasilitasi benih dan pakan juga mencarikan pasar ke luar negeri.
- Untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan budidaya rumput laut di Provinsi pada tahun 2019 juga telah dilaksanakan program kegiatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Pengembangan Budidaya Rumput Laut yang kegiatannya akan membuat kebun benih rumput laut agar dapat menyediakan benih unggul, selain itu melalui Program Penguatan Daya Saing dan Kegiatan sarana dan prasarana Hasil Perikanan akan menyiapkan sarpras hasil panen rumput laut. di tahun 2017 juga telah diselesaikan Penyusunan Study Kelayakan dan Detail Engenering (DED) Pembangunan Unit Pengolah Rumput Laut di Moro Karimun.

Tabel 3.7
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019

No	Kabupaten/ Kota	2018				2019			
		Laut	Tawar	Payau	Rumput Laut	Laut	Tawar	Payau	Rumput Laut
1	Karimun	171.20	2,056.46	20.84	2,020.9	1.148,00	5.969,39	21,26	2.461,21
2	Bintan	83.60	4,6804.69	0.28	-	549,37	4.694,06	2,40	-
3	Natuna	8.78	-	-	5,814.1	203,32	36,20	0,22	27,10
4	Lingga	6.10	18.08	21.29	8	320,00	18,11	21.71	1,80
6	Kep Anambas	540.60	1,122.88	-	2,109.1	843,94	1.125,13	-	2
7	Batam	325.39	12,699.52	0.59	2,647	937,00	12.064,54	0.60	2.514,62
8	Tanjungpinang	10.23	30.24	-	-	11,63	30.30	-	-
	Jumlah	1,145.90	20,611.87	42.99	12,599.10	4.013,26	23.937,73	46,16	5.005,92
				Total	34.399,86				33.003,11

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penurunan produksi secara drastis terjadi pada rumput laut. Terutama di Kabupaten Natuna dan Kab. Kepulauan Anambas. Kedepan perlu dibenahi dan dibentuk rantai pasar untuk menjaga stabilitas harga rumput laut sehingga menggairahkan para pembudidaya rumput laut.

D. NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan di suatu daerah pada tahun dan bulan tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya. NTPi dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan pembudidaya ikan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi. NTPi adalah rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan, yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100 artinya

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau – 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. NTPi kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran pembudidaya ikan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTPi sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

Evaluasi terhadap indikator Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) dilakukan pencacahan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menghitung angka kesejahteraan pembudidaya ikan. Hasil evaluasi terhadap Nilai Tukar Nelayan (NTPi) dengan target sebesar **107,75** di tahun 2018 terealisasi sebesar **108,20** atau **100,82%** atau dalam **kategori Sangat Tinggi**. Sedangkan pada tahun 2019, target NTPi sebesar 207,99 terealisasi sebesar 126,77 atau 117,39%. Berikut tabel perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Tukar Nelayan Tahun 2018-2019:

Tabel.3.8 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018 - 2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2018	2019
1	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	108.20	126.77

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Nilai Tukar pembudidaya ikan (NTPi) dari Tahun 2018 ke tahun 2019. Pada Tahun 2018 NTN sebesar 108,20 dan di tahun 2019 meningkat menjadi 126,77. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 secara rata-rata pembudidaya ikan mengalami peningkatan dari hasil usahanya dibandingkan dengan pengeluarannya akibat dari kenaikan harga produksi lebih kecil imbas dari penurunan produksi budidaya perikanan dari peningkatan pengeluaran/konsumsi pembudidaya ikan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi olahan hasil perikanan

E. JUMLAH PRODUKSI OLAHAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jumlah Produksi olahan adalah Volume produk olahan hasil perikanan yang terdiri dari volume produksi olahan unit pengolahan ikan (UPI) skala besar di tambah volume produksi olahan UPI skala UMKM Data capaian dihitung triwulanan/Akhir Tahun.

Evaluasi terhadap Jumlah Produksi olahan hasil perikanan adalah Jumlah hasil olahan hasil perikanan dicatat/ di cacah oleh petugas statistik perikanan *eunerator* maupun perhitungan secara estimasi di desa sampel di Kab/Kota Data di atas dikompilasi dan divalidasi oleh petugas. Hasil evaluasi terhadap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dengan target sebesar 1.326,23 Ton di tahun 2019 terealisasi sebesar 1.803,55 Ton atau 135,99 % atau dalam **kategori kinerja Sangat Tinggi**.

Tabel.3.9 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2018	2019
1	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)	1,336.82	1,803.55

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018. Pada Tahun 2018 produksi perikanan olahan hasil perikanan sebesar 1.336,82 Ton dan di tahun 2019 produksi meningkat menjadi 1.803,55 Ton.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi olahan hasil perikanan ini adalah :

Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan, dengan kegiatan :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

- Promosi dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan output kegiatan berupa : Promosi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan termasuk Dalam Rangka Kegiatan Kepri Gerbang Wisata Bahari dengan pelaksanaan 4 event yang diikuti;
- Dukungan Program Nasional "Gemarikan" : Festifal Kuliner Dalam Rangka Kegiatan Kepri Gerbang Wisata Bahari : 2 event
- Meningkatkan Kualitas Produk Olahan : 6 kelompok pengolahan pemasar yang dilakukan pembinaan
- Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan fokus pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan dan pembinaan kelompok untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. selama Tahun 2018 sebanyak 16 Unit Pengolah Ikan (UPI) di Provinsi Kepulauan Riau yang mendapatkan SKP tersebut.
- Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan, dengan fokus pelaksanaan kegiatan di Tahun 2018 : Penyusunan *Feasibility Study* (studi Kelayakan) industri pengolahan rumput laut (termasuk rekomendasi pengelola) dan *Detail Engenering Detail (DED)* Unit Pengolahan Rumput Laut di Moro Karimun dan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Sasaran III : Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan

F. PENINGKATAN STATUS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LEVEL III

Status kawasan konservasi perairan pada level III, adalah Kawasan Konservasi dikelola Minimum dengan persyaratan minimal :

- Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi;
- SOP Pengelolaan
- Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi
- Penetapan kawasan konservasi perairan

Status Level Pengelolaan Kawasan Konservasi :

Jumlah Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Level 1: kawasan konservasi diinisiasi	- usulan inisiasi
		- identifikasi & inventarisasi kawasan
		- Pencadangan kawasan
	Level 2: kawasan konservasi didirikan	- unit organisasi pengelolaan SDM
		- Rencana pengelolaan dan zonasi
		- Sarpras pendukung pengelolaan
		- Dukungan pembiayaan
	Level 3 : Kawasan Konservasi dikelola Minimum	- Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi
		- SOP Pengelolaan
		- Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi
		- Penetapan kawasan konservasi perairan
	Level 4 : Kawasan Konservasi dikelola optimum	- Penataan batas kawasan
		- Pelembagaan
		- Pengelolaan sumberdaya kawasan
		- Pengelolaan sosekbud
Level 5 : Kawasan Konservasi mandiri (KKM)	- Peningkatan kesejahteraan masyarakat	
	- Pendanaan berkelanjutan	

Evaluasi terhadap penetapan kawasan konservasi yang dikelola pada level III adalah adanya dokumen-dokumen pendukung yang didapatkan baik dari pemerintah daerah maupun dokumen-dokumen Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Hasil evaluasi terhadap Status kawasan konservasi perairan pada level III di tahun 2019 terealisasi 1 (lokasi) yaitu kawasan konservasi di Bintan dari 4 lokasi yang direncanakan yaitu Batam, Bintan dan Lingga. terealisasi 25%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini adalah :

Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kegiatan :

- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
- Konservasi dan Rehabilitasi Sumber daya Kelautan dan Perikanan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

- Dukungan Pelaksanaan Coremap II

Dari 4 (empat) kawasan yang ditargetkan terdapat 1 (satu) kawasan (kab. Bintan) telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan akan ditetapkan menjadi KKPD Kab. Bintan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sedangkan 3 (tiga) kawasan dalam proses penyelesaian. Selain itu juga, telah dilakukan upaya percepatan penetapan kawasan konservasi yang dibantu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang Satker Tanjungpinang.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi, disamping juga merupakan alat kendali atau penilai kualitas kerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Program dan Kegiatan serta arah kebijakan yang telah ditetapkan melalui sumber dana APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 dalam rangka mencapai target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga **capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 rata-rata berjumlah 89,23% atau dalam kategori sangat tinggi dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU, dengan realisasi anggaran sebesar : 99,61%.**


Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ditahun mendatang harus ditempuh dengan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja.

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama : **Des. EDY SOFYAN, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Januari 2018

<p style="text-align: center;">Pihak Kedua, GUBERNUR KEPULAUAN RIAU</p> <p style="text-align: center;"> Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si</p>	<p style="text-align: center;">Pihak Pertama, KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p style="text-align: center;"> Des. EDY SOFYAN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19650124 198903 1 006</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

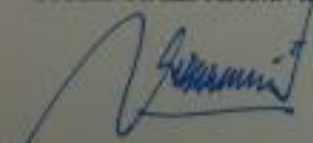
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	304.628,57
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	33.717,38
		Nilai Takar Nelayan (NTN) (%)	109,84
		Nilai Takar Pembudidaya Ikan (Ntpi) (%)	107,75
2	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	1.323,58
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Peningkatan Status Kawasan Konservasi Perairan Level III (Kawasan)	3
		Produk Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Dokumen)	3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 5.684.000.000	APBD
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 3.740.000.000	APBD
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp. 8.467.000.000	APBD
4. Program Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan	Rp. 750.000.000	APBD
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.800.000.000	APBD
6. Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 975.000.000	APBD
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 10.885.000.000	APBD

Tanjungpinang, 3 Januari 2018

Pihak Kedua,

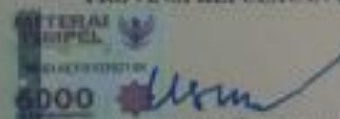
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. EDY SOFYAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650124 198903 1 000

